



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, 55812  (0274) 391 537
 kesbangpol@gunungkidulkab.go.id  kesbangpol.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2025

Kepala,



JOHAN EKO SUDARTO, S. Sos., MH.

NIP. 197109121991011001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan indikator meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat”:
 - Diukur dengan indikator konflik sosial yang tertangani (Jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi Jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial; serta Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 112,36% terjadi penurunan sebesar 12,36%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun N-1
 -



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Target capaian indikator ditetapkan sebesar 80,15 terealisasi 82,78 sehingga capaian kinerja sebesar 103,28%. Dengan demikian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,28%. Dalam LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2024 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 78,87% terjadi peningkatan sebesar 3,68%.
- Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 82,55 (BB). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negative modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi;



2. Belum kuatnya peran dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul sehingga menyebabkan belum optimalnya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Gunungkidul, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten;
3. Semakin meningkatnya kebebasan Publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpeluang menjadi konflik sosial di masyarakat;
4. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), sehingga Muncul Aplikasi Pinjaman online dan Judi online di Handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat dapat terjerat hutang dan menjadi pemicu konflik sosial;
5. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti misalnya Undang – undang no 17 Tahun 2013, tentang ORMAS, telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan ormas kurang optimal.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	3
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	8
BAB II <u>PERENCANAAN KINERJA</u>	13
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	24
BAB III <u>AKUNTABILITAS KINERJA</u>	26
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	26
B. Capaian Kinerja Lainnya	55
C. Efisiensi Anggaran	57
D. Inovasi.....	62
BAB IV <u>PENUTUP</u>	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Langkah Perbaikan Kinerja	66
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024.....	10
Tabel I.4 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022	52
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	16
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	19
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.....	22
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.....	22
Tabel II.6 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	23
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel III.4 Capaian Sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat	28
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	30
Tabel III.6 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis.....	31
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	33
Tabel III.9 Kegiatan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2024.....	35
Tabel III.10 Kegiatan Penyuluhan Penyuluhan P4GN Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2024.....	36
Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2024.....	37
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	51
Tabel III.13 Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	51



Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	52
Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	53
Tabel III.16 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	53
Tabel III.17 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	57
Tabel III.18 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunugkidul	5
Gambar II.1. E-SAKIP	24
Gambar II.2. Sipanda.....	25
Gambar II.3. Siapgaspol	25
Gambar III.2 Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul.....	31
Gambar. III.3 Anggota Korsik Kabupaten Gunungkidul mengiringi upacara	38
Gambar. III.4 Forum Gabungan Perangkat Daerah.....	38
dengan urusan pemerintahan umum.....	38
Gambar. III.5 Rakor Pendataan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.....	39
Gambar. III.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi PPI Kabupaten Gunungkidul ...	39
Gambar. III.7 Apel P4GN oleh Ketua BNK Gunungkidul	40
Gambar. III.8 Pendidikan Politik Bersama Pemilih Pemula	41
Gambar. III.9 Pendidikan Politik Masyarakat	41
Gambar. III.10 Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	42
Gambar. III.12 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.....	42
Gambar. III.13 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul.	43
Gambar. III.14 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul.	43
Gambar. III.14 Aubade Paskibraka Kab. Gunungkidul.	44
Gambar. III.14 Pembukaan desa bahagia Paskibraka Kab. Gunungkidul.....	44
Gambar. III.14 Latihan Paskibraka Kab. Gunungkidul.....	45
Gambar. III.14 Pengibaran Bendera dan penuruna Bendera Upacara 17 Agustus oleh Paskibraka Kab. Gunungkidul.....	46
Gambar. III.16 ramah Tamah paskibraka bersama gubernur DIY	46
Gambar. III.16 Kemitraan Pembinaan Ormas	47
Gambar. III.17 Pengembaraan Kebangsaan	48
Gambar. III.18 Pengembaraan Kebangsaan	48
Gambar. III.19 Konser Kebangsaan Pentas Bhinneka Tunggal Ika	49
Gambar. III.19 Penghargaan Kantor Imigrasi Kelas kelas I TPI Yogyakarta.....	54
Gambar. III.20 Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	54



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



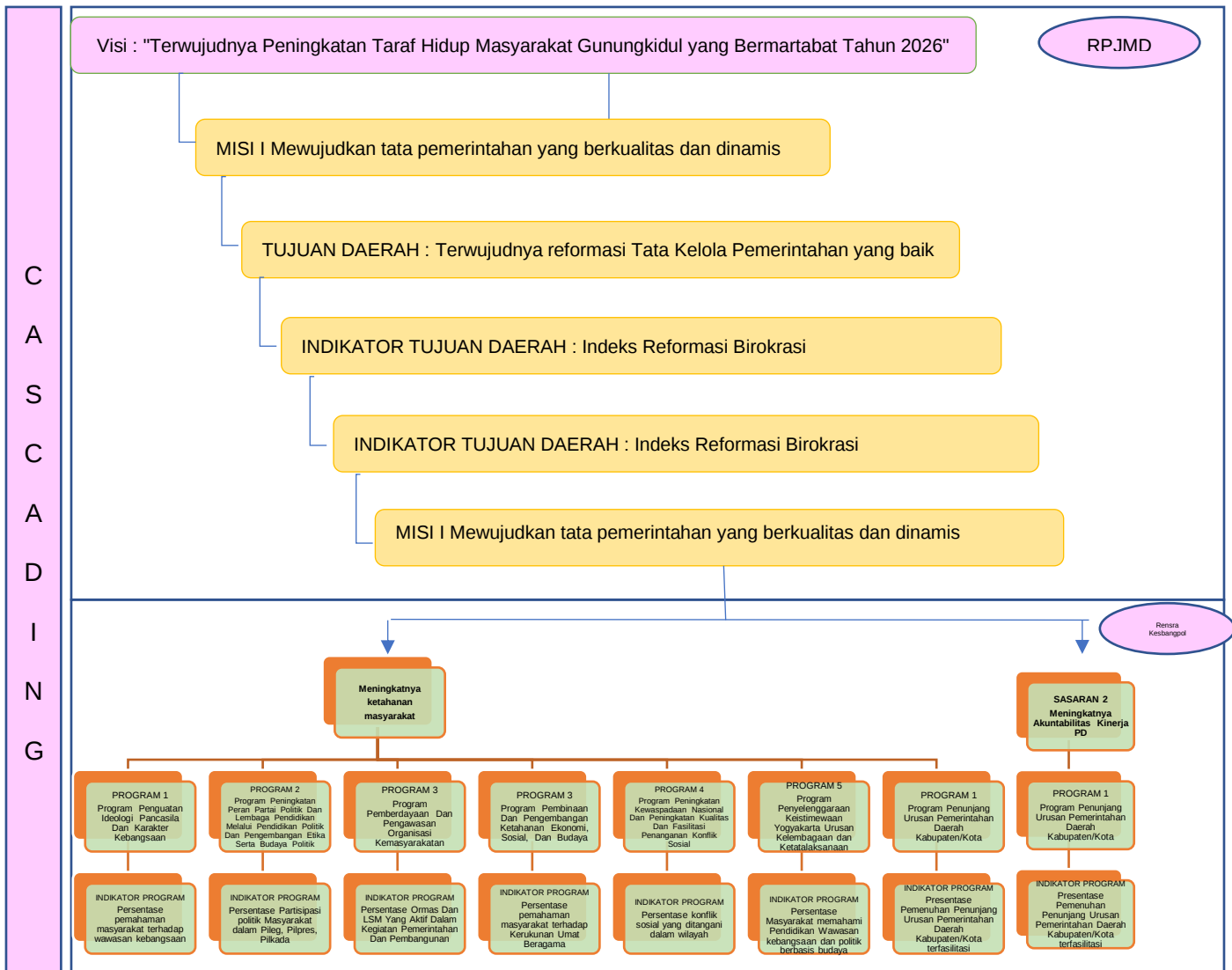
dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024, maka LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2024 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

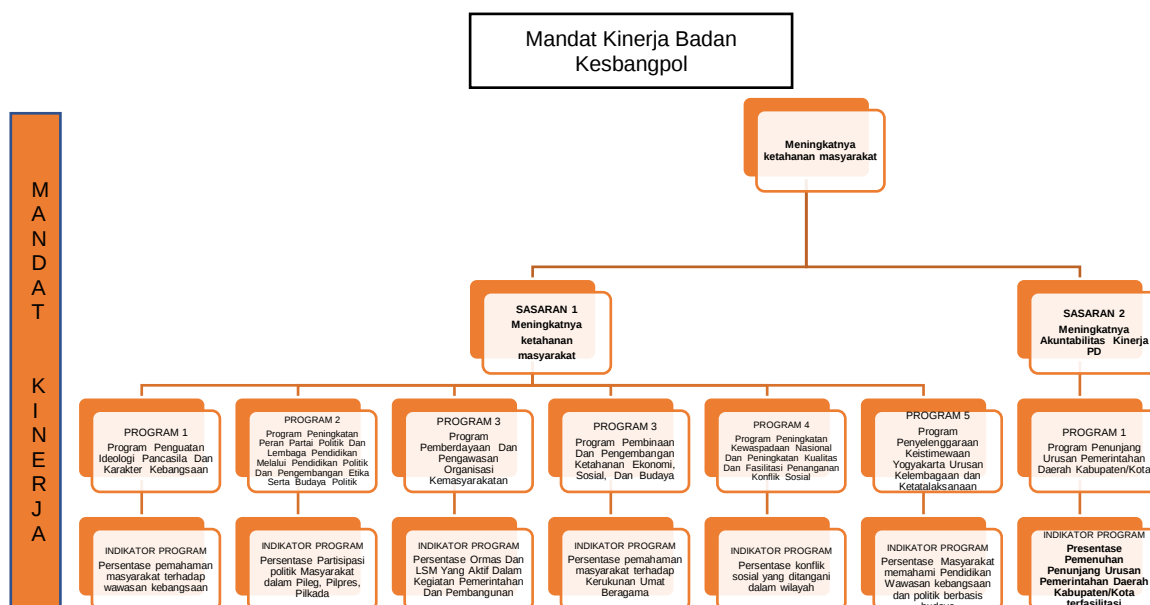


Gambar I.1. Cascading Kinerja

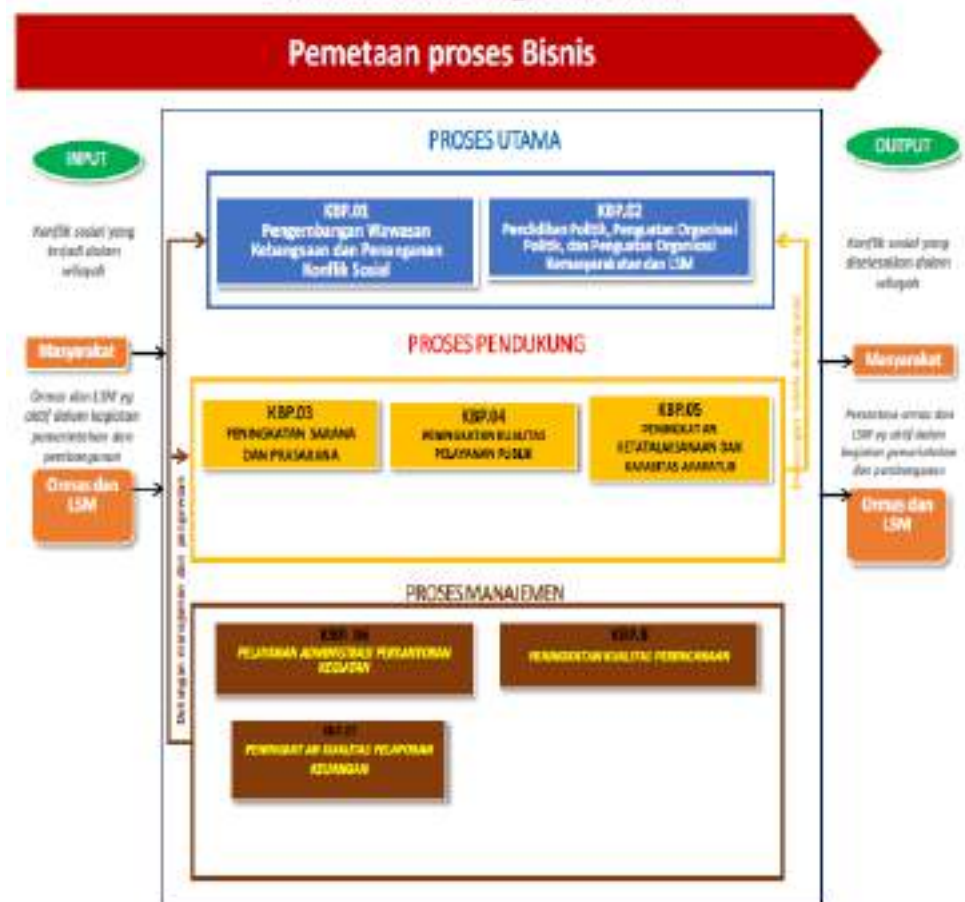
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

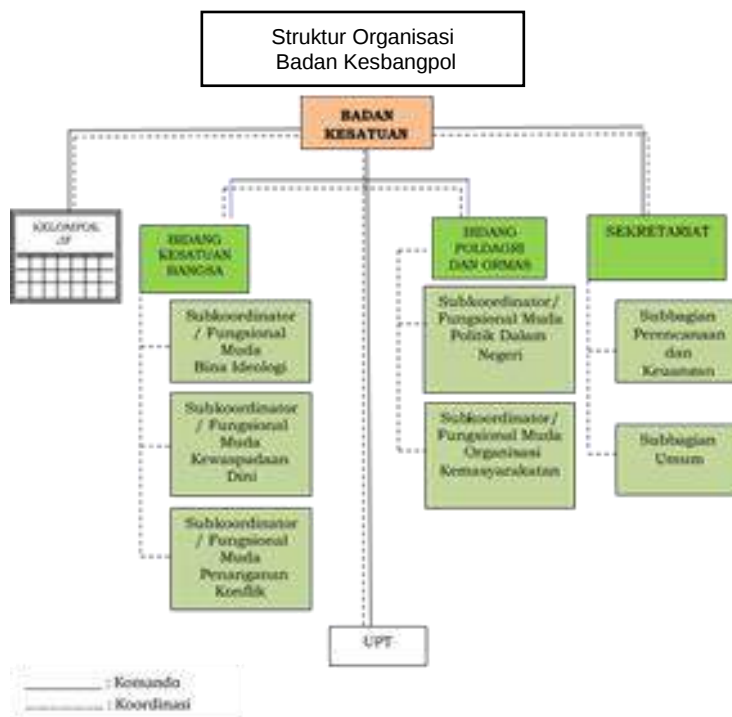
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



**Pengetompokkan Proses Bisnis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**





Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;



2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rencana kineria dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragarna, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;



8. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
9. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;
10. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan Bangsa dan Politik; dan
12. Pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi
2. Belum kuatnya peran dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul sehingga menyebabkan belum optimalnya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Gunungkidul, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten.
3. Semakin meningkatnya kebebasan Publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat



4. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), sehingga Muncul Aplikasi Pinjaman online dan Judi online di Handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat dapat terjatuh hutang dan menjadi pemicu konflik sosial
5. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti misalnya Undang – undang no 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan ormas kurang optimal.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6				7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi	15					2	2					
	1. Administrator	3	S2				1	1				2	1
	2. Pengawas	2	S2	S1			2	1	1				2
	3. Pelaksana	10		S1	D3	SMA	10		4	3	3	4	6
C.	Jabatan Fungsional	6	S2	S1	S1		6	2	3	1		2	4
	Jumlah	22					22	7	8	4	3	9	13

Sumber: Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Desember 2024



Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (36,36%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (31,82%), D3 4 orang (18,18%), SMA 3 orang (13,64%). Komposisi pegawai perempuan (59,09%) lebih banyak dibanding pegawai laki-laki (40,91%); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan, dengan salah satunya pada level administrator. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 16 pejabat pelaksana administratif. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbagian 2 yang menangani 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan untuk optimalisasi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Alat-alat Angkutan Aset Tetap	11 unit	548.125.351,56
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	226 unit	347.554.023,00
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20 unit	54.889.054,00
1	Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	7 buku	435.000,00
	<i>Jumlah</i>		951.003.429

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2024 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, dan 9 (Sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio



personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang yang aman serta nyaman juga disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Badan Kesatuan bangsa dan Politik, sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik mutlak diperlukan. Penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan antara lain:

- a. Ruang laktasi
- b. Bangunan yang telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp
 - toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00
4	1	2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5			BELANJA DAERAH	34.824.464.282,00	34.822.839.501,00	(1.624.781,00)
5	1		BELANJA OPERASI	34.824.464.282,00	34.737.839.501,00	(86.624.781,00)
5	1	1	Belanja Pegawai	1.563.183.182,00	1.546.303.401,00	(16.879.781,00)
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	3.097.388.342,00	2.999.192.932,00	(98.195.410,00)
5	1	5	Belanja Hibah	30.163.892.758,00	30.192.343.168,00	28.450.410,00
5	2		BELANJA MODAL	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Belanja	34.824.464.282,00	34.822.839.501,00	
			Total Surplus/(Defisit)	(34.824.464.282,00)	(34.822.839.501,00)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
			Pembiayaan Neto	0,00	0,00	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul semula Rp 34.824.464.282,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 34.822.839.501,00 atau berkurang Rp 1.624.781,00. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran. Secara garis besar anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan, kenaikan pada



hibah. Namun secara operasional mengalami penurunan karena *refocusing* anggaran dikarenakan menyesuaikan kebutuhan anggaran di tahun berjalan.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat”

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



**Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	88	89	90	91	92	93	93
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	75,39	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	80,25

Sumber data: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat (ASN, perangkat desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh difable, anak, dll)



NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (ASN, perangkat desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh difable) serta Pemetaan Politik, Potensi Daerah, dan Potensi Kerawanan konflik Penguatan kapasitas ormas dan LSM Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Penguatan koordinasi, kerjasama dan networking/jejaring dengan TNI, Polri, Kejaksaan, PD terkait, Tim Pengumpul data dan informasi strategis, FKDM, BNK dan mitra kerja dlm penanganan konflik
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD

Sumber data: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya ketahanan masyarakat	1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.100.384.400	1.101.928.400	1.544.000
	1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	1.100.384.400	1.101.928.400	1.544.000
		1.1.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	999.986.900	1.001.330.900	1.344.000
		1.1.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.397.500	100.597.500,00	200.000
	1.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.420.297.458	30.448.747.868	28.450.410
	1.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.420.297.458	30.448.747.868	28.450.410
		1.2.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36.354.700	36.354.700	0

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.383.942.758	30.412.393.168	28.450.410
	1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	68.225.000	68.625.000	(400.000)
	1.3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.225.000	68.625.000	(400.000)
	1.3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	68.225.000	68.625.000,00	(400.000)
	1.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	283.009.000	283.009.000	0
	1.4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	283.009.000	283.009.000	0
	1.4.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	283.009.000	283.009.000	0

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	364.807.300	365.007.300	(200.000)
	1.5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	364.807.300	365.007.300	(200.000)
		1.5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.240.000	1.240.000	0
		1.5.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.600.000	27.600.000	0
		1.5.1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	159.712.400	159.912.400	(200.000)

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.5.1.4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.954.900	15.954.900	0
		1.5.1.5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	160.300.000	160.300.000	0
	1.6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	284.163.000	283.273.000	(890.000)
		1.6.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	284.163.000	283.273.000	(890.000)
		16.1.1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	284.163.000	283.273.000	(890.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran			32.520.886.158	32.550.590.568	28.504.410

Sumber data: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.303.578.124	2.312.659.533	9.081.409
	1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.813.900	83.413.900	600.000
		1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.353.500	32.553.500	200.000
		1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.472.500	25.672.500	200.000

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	90.000	90.000	0
		1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	212.500	212.500	0
		1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	212.500	212.500	0
		1.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.062.900	24.262.900	200.000
		1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000	410.000	0
	1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.595.060.682	1.578.380.901	(16.679.781)
		1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.563.183.182	1.546.303.401	(16.879.781)
		1.1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000	600.000	0
		1.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.277.500	31.477.500	200.000
	1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.831.900	10.831.900	0
		1.1.3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.831.900	10.831.900	0
	1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.197.400	318.424.800	86.227.400
		1.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.209.000	4.209.000	0
		1.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.837.500	115.837.500	85.000.000
		1.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.882.600	6.110.000,00	1.227.400
		1.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.293.300	7.293.300	0

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Total Anggaran Pendukung		1.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0
		1.1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.775.000	183.775.000	0
	1.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.534.042	179.592.032	77.057.990
		1.1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.660.000	56.060.000	400.000
		1.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.999.042	103.178.032	61.178.990
		1.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.875.000	20.354.000	15.479.000
	1.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.140.200	142.016.000	(138.124.200)
		1.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.600.000	71.857.400	9.257.400
		1.1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.570.000	11.570.000	0
		1.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.970.200	5.878.000	(194.092.200)
		1.1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	12.300.000,00	6.300.000
			2.303.578.124	2.312.659.533	9.081.409

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	91	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	91
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	80,15	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	80,15

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	80,15	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	80,15

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.6 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.101.928.400,00	APBD
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.448.747.868,00	APBD
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.625.000,00	APBD
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	283.009.000,00	APBD
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	365.007.300,00	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	283.273.000,00	Dais
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.272.248.933,00	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, volume anggaran di dominasi adanya hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk kegiatan pemilu tahun 2024.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

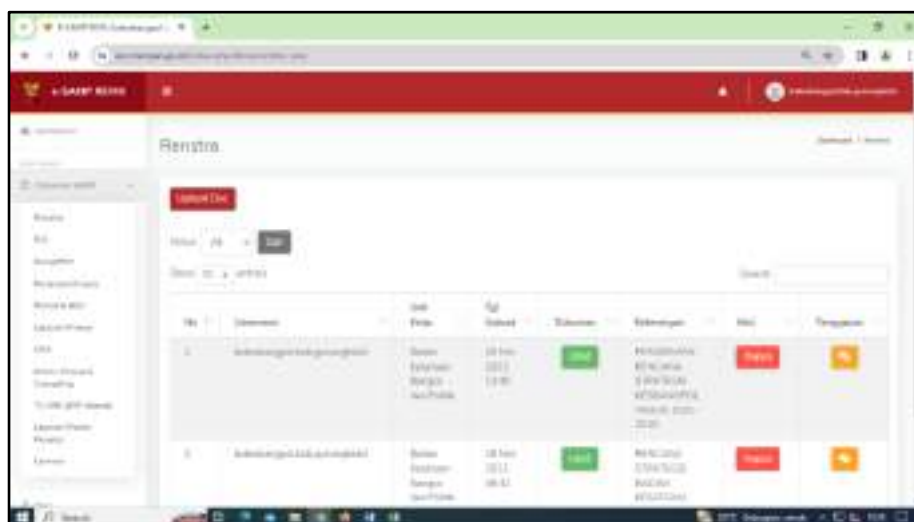


3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga .
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi .

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instumen Pendukung Capaian Kinerja pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



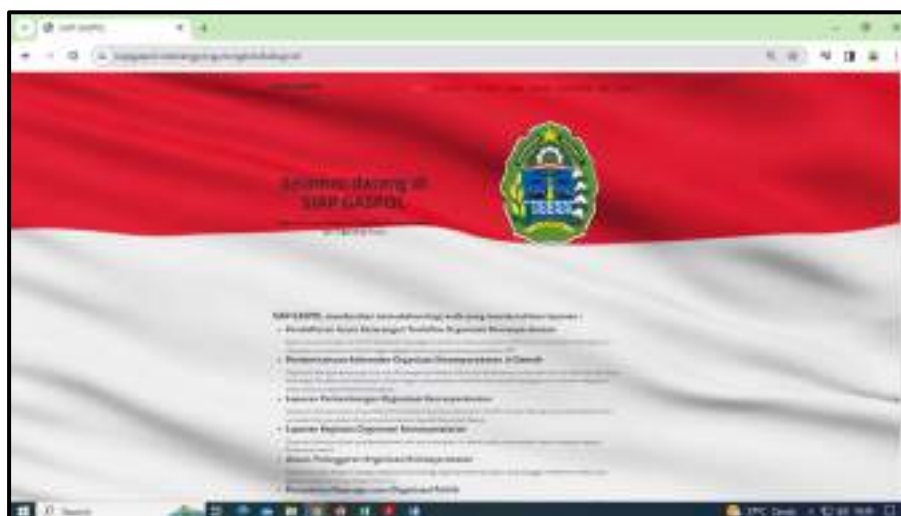
Gambar II.1. E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.2. Sipanda

3. Instrumen pendukung dalam data ormas, pendaftaran ormas , dan dokumentasi dari organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kabupaten Gunungkidul, yakni Aplikasi Online Sistem Informasi Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan dan Organsisasi Politik (siaggaspol). Selain berfungsi untuk pendataan dan pendaftaran Ormas, aplikasi ini juga berperan dalam Pemberdayaan Ormas yang meliputi Sosialisasi Regulasi, Bimbingan Teknis dan Koordinasi, serta Pengawasan Ormas berupa pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.



Gambar II.3. Siaggaspol



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITE RIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	<u>Indikator:</u> Persentase konflik sosial yang tertangani <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100 persen	Persentase	112,36	111,11	100	100	100	Sangat Tinggi	100
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	<u>Indikator:</u> Nilai AKIP PD <u>Meta Indikator:</u> Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	skor	78,87	82,55	80,15	82,78*	103,28	Sangat Tinggi	80,25

Ket *: realisasi AKIP Tahun 2023

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan masyarakat

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat diukur dengan jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100 persen meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Konflik sosial adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$ Tipologi data: Non Kumulatif m

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 100 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100.

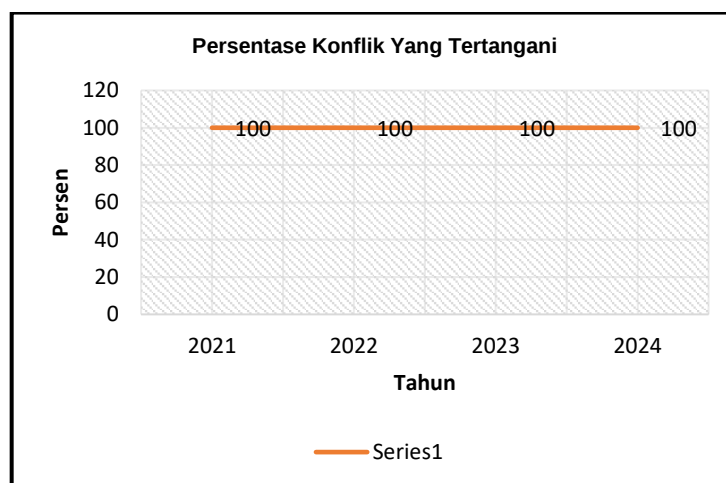
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa Indikator Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah telah mencapai target, dari target 100% realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Berdasarkan data yang ada di tahun 2024, ada 2 (dua) konflik sosial yang terjadi dan dari 2 (dua) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya sebesar 100%.

Berdasarkan data historis dalam kurun 2021 - 2024, realisasi angka persentase konflik masyarakat yang tertangani menunjukkan penurunan dan stabil. Dari data dan juga dari gambar III.3 Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah, persentase konflik masyarakat yang terselesaikan justru cenderung stabil.



Pada pada tahun 2021, realisasi persentase konflik masyarakat yang tertangani sebesar 100% dari 4 (empat) konflik yang terjadi sejumlah 4 (empat). Sedangkan pada tahun 2022, ada 3 (tiga) konflik sosial yang terjadi dan dari 3 (tiga) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi disimpulkan penanganan konflik sosial 100%. Pada tahun 2023, ada 4 (empat) konflik sosial yang terjadi dan dari 4 (empat) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi disimpulkan penanganan konflik sosial 100%. Pada tahun 2024, ada 2 (dua) konflik sosial yang terjadi dan dari 2 (dua) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi disimpulkan penanganan konflik sosial 100%. Persentase konflik masyarakat yang tertangani dari data historis dari tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar III.1 Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Realisasi kinerja sebesar 100 pada tahun 2023 stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	93	107,53

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 100 menjadi 100 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 100, pada tahun 2024 menjadi 100, hal tersebut menunjukkan konflik sosial yang terjadi dapat tertangani semua di tiap tahunnya.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja relative stabil dikarenakan potensi konflik dapat tertangani. Konsistensi dalam kesetabilan kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 109,89 dicapai melalui kegiatan pembinaan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi selalu berupaya dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada dapat meningkat, peran serta ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan meningkat, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama meningkat, konflik sosial yang ditangani dalam wilayah meningkat, sekaligus dapat meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK),* serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.



Selain perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun, perbandingan capaian kinerja dengan OPD lain yang sejenis juga dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang lebih akurat. Berikut ini disajikan perbandingan indikator, target dan realisasi sasaran strategis dari OPD lain.

Tabel III.6 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis

No.	Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Target %	Realisasi %	% Realisasi Target
1	Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul	Meningkatnya Ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	89	100	112,36
2	Kesbangpol Kota Yogyakarta	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik	82%	82,73	101
3	Kesbangpol Kota Malang	Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	72,05	70,58	72%
4	Kesbangpol Kabupaten Banjar	Mewujudkan Masyarakat berwawasan kebangsaan dan kondusifitas	Prosentase Konflik yang berhasil ditangani	100	100	100

Sumber: data tahun 2024

Gambar III.2 Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul



Sumber : Subbidang Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target Sasaran masalah/kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun dengan indikator kinerja persentase konflik masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:



1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$ Tipologi data: Non Kumulatif
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	$\frac{\sum \text{Jumlah Ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan}}{\sum \text{Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang mengikuti pemilu}}{\sum \text{Jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Sasaran	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kategori
Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Konflik sosial yang tertangani	126,25	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	90	90	100 Sangat Tinggi
			2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5	100	121,21 Sangat Tinggi
			3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan	72	100	138,89 Sangat Tinggi



Sasaran	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kategori
			4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	90	90	100 Sangat Tinggi
			5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	91	100	111,11 Sangat Tinggi
			6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	74	100	138,88 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					83,25	96,67	117,52 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Konflik sosial yang tertangani rata-rata 100,25%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keenam program utama tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan OPD dan Instansi Vertikal dengan peserta dari unsur/kelompok masyarakat antara lain: Organisasi Kemasyarakatan, Pamong Kalurahan, Badan Permuyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, karangtaruna, kalangan pelajar, kelompok perempuan dan sebagainya, Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran konflik sosial yang tertangani tersebut didukung dari :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari kegiatan:

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka



Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terdiri atas beberapa antara lain:

- a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan PPI, yaitu 29 Oktober 2024 di Ruang Rapat Handayani.
- b) Pembinaan Forum pembauran Kebangsaan, yaitu :
 - 1) Lokasi di Wunung, pada tanggal 20 Juni 2024
 - 2) Lokasi di Karangrejek, pada tanggal 19 Juni 2024

Tabel III.9 Kegiatan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2024

No	Hari/Tanggal	Acara
1	22 Maret 2024	Pembinaan KUB Forkopimda di RR. Handayani
2	16 Mei 2024	Pembinaan KUB Forkopimda Kapanewon Semin
3	21 Mei 2024	Pembinaan KUB Forkopimda Kapanewon Gedangsari
4	12 Juni 2024	Pembinaan KUB PIS Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat kegiatan seperti ditampilkan pada table di bawah ini:



Tabel III.10 Kegiatan P4GN Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
1	Apel P4GN	19-2-2024	SMAN 1 WONOSARI	
2	Apel P4GN	26-2-2024	SMA N 1 PLAYEN	
3	Apel Sosialisasi P4GN	4-3-2024	SMKN 1 PONJONG	
4	Apel Sosialisasi P4GN	31-05-2024	SMA N 2 PLAYEN	
5	Podcast P4GN	05-06-2024	di Radio Dhaksinarga	
6	Sosialisasi P4GN	12-06-2024	Kalurahan Ngipak Karangmojo	
7	Sosialisasi P4GN Forkopimda	19-06-2024	Kapanewon Tanjungsari	
8	Podcast P4GN HANI	26-6-2024	Radio Swara Dhaksinarga	
9	Apel Sosialisasi P4GN	30-7-2024	SMK YAPPI WONOSARI	
10	Apel Sosialisasi P4GN	30 -9-2024	SMA 2 Wonosari	
11	Apel Sosialisasi P4GN	23 -9-2024	SMA AL Mujahidin Wonosari	
12	Apel Sosialisasi P4GN	4-11-2024	SMA N 1 SEMIN	
13	Apel Sosialisasi P4GN	11-11-2024	SMK KESEHATAN	
14	Narasumber P4GN	9-12-2024	SMP N 1 WONOSARI	

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan pembinaan bimtek pengadministrasian bantuan keuangan partai politik dan bimtek laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. yang terdiri atas kegiatan:



**Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri
Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
1.	Pendidikan Politik Masyarakat	22-5-2024	Kapanewon Gedangsari	
2.	Pendidikan Politik Masyarakat	11-6-2024	Kapanewon Ponjong	
3.	Pendidikan Politik Masyarakat	16-6-2024	Kapanewon Puwosari	
4.	Pendidikan Politik Masyarakat	20-8-2024	Kapanewon Patuk	
5.	Pendidikan Politik Pemilih Pemula	27-8-2024	Ruang rapat Handayani Setda Gunungkidul	

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas kegiatan:

**Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri
Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
1.	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan bersama Pemerintah Daerah	29-4-2024	Kapanewon Nglipar	
2.	Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	27-8-2024	Ruang rapat Dhaksinarga Setda Gunungkidul	
3.	Rakor Tim Terpadu Pendataan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20-4-2024	Ruang rapat Dhaksinarga Setda Gunungkidul	
4.	Rakor Tim Terpadu Pendataan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13-11-2024	Ruang rapat Dhaksinarga Setda Gunungkidul	

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 tersebut diantaranya:

- a) Anggota korsik pada Jumat, 20 Desember 2024 mengiringi Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Progo 2024 untuk pengamanan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, Apel dilaksanakan di alun-alun Wonosari. Kegiatan ini



merupakan persiapan pasukan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 .

Gambar. III.3 Anggota Korsik Kabupaten Gunungkidul mengiringi upacara



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan urusan pemerintahan umum. Bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul.

Gambar. III.4 Forum Gabungan Perangkat Daerah
dengan urusan pemerintahan umum



Sumber : Subbag. Umum Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rapat koordinasi tim pendataan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang di pimpin oleh Analis Ahli Muda Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan dan dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggota tim diantaranya Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Se-Kabupaten Gunungkidul. Dalam acara tersebut Kepala Badan Kesbangpol menjelaskan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendataan dan Pengawasan Ormas, Kemudian mengajak untuk bersama-sama saling memantau jangan sampai ada organisasi



kemasyarakatan yang meresahkan. Selanjutnya menjelaskan bahwa kegiatan di Badan Kesbangpol bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga dalam rangka menciptakan kerukunan. Kemudian mengajak jajaran pemerintah kapanewon untuk senantiasa menciptakan kondusifitas, menjaga kerukunan, persatuan kesatuan, dan menjaga silaturahmi.

Gambar. III.5 Rakor Pendataan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi dihadiri oleh Kapolres Gunungkidul, Kasat Binmas Polres Gunungkidul, Paup Pasipers Kodim 0730 Gunungkidul, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul, PPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dan Calon PPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Gambar. III.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi PPI Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- e) Apel Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di SMA Negeri 1 Semin pada hari Senin, 4 November 2024. Apel sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Heri Susanto, S.Kom, M.Si. Dalam arahnya, Plt. Bupati Gunungkidul tersebut mengajak para siswa siswi SMA Negeri 1 Semin untuk menolak peredaran dan penggunaan narkoba yang semakin mudah untuk diakses para generasi muda. Adanya kegiatan apel juga disebut dapat menjadi momentum bagi para generasi muda Gunungkidul menatap masa depan yang lebih cerah. Para siswa dapat memiliki cita-cita yang dapat digapai dengan membangun komitmen dan menciptakan momentum yang baik dengan lebih fokus pada belajar dan menggunakan alat komunikasi dengan lebih bijak, serta berani menolak terhadap narkoba.

Gambar. III.7 Apel P4GN oleh Ketua BNK Gunungkidul



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan bertempat di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Pendidikan Politik Bersama Pemilih Pemula. Hadir dalam acara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Johan Eko Sudarto, S.Sos, MH, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Deni Tri Utomo, S.Ag, Ketua PPK Arif Nurgiantoro, dan Peserta dari perwakilan SMA sederejat di wilayah Wonosari, Playen dan Karangmojo.



Gambar. III.8 Pendidikan Politik Bersama Pemilih Pemula



*Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
& LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..*

- g) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa 11 Juni 2024 menyelenggarakan Pendidikan Politik Masyarakat. Hadir dalam acara Ketua Divisi Hukum KPU Gunungkidul Antok, S.Kom,MM, Kanit Pidsus Polres Gunungkidul Iptu Andang Patriasmo, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Karangmojo, dan Peserta Pendidikan Politik Masyarakat.

Gambar. III.9 Pendidikan Politik Masyarakat



*Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan &
LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.*

- h) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada hari Kamis, 21 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah. Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kapos BINDA Gunungkidul, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua



Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Panewu Se-Kabupaten Gunungkidul, Kapolsek se- Kabupaten Gunungkidul, dan Danramil/Danposmil se-Kabupaten Gunungkidul.

Gambar. III.10 Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- i) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Aula Kapanewon Semin pada hari Kamis, 16 Mei 2024. Hadir sebagai narasumber yaitu Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonosari, Heri Kusyanto, S.H. dan Kasat Binmas Polres Gunungkidul, AKP. Suharjiyanto, S.H. Peserta pembinaan merupakan tokoh agama, wokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Kapanewon Semin..

Gambar. III.12 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- j) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tahapan seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yaitu seleksi PBB dan Kesamaptaan Bertempat di Gelanggang Olahraga Handayani. Bupati Gunungkidul, H. Sunaryanta dalam kegiatan tersebut



untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada putra-putri Gunungkidul yang berkesempatan menjadi peserta seleksi Calon Paskibraka Tahun 2024.

Gambar. III.13 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- k) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tahapan kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yaitu Tes Kesehatan. Kegiatan ini bertempat di Gedung Kesenian Wonosari dan diikuti oleh 140an peserta dari berbagai SMA/SMK/MA se Kabupaten Gunungkidul yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi sebelumnya yaitu Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Intelegensia Umum. Dalam Tes Kesehatan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemeriksaan Tes Kesehatan dimulai Pukul 08.00 WIB yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul, Johan Eko Sudarto, S.Sos.,MH. dan didampingi oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Nani Asyfhah, S.Sos.,M.Si.

Gambar. III.14 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- l) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Aubade Paskibraka Kabupaten Gunungkidul dan Paskib 18 Kapanewon Gunungkidul yang bertempat di Taman Budaya Gunungkidul pada tanggal 2 Agustus 2024. Yang di awali dengan lari bersama Bupati Gunungkidul dari Alun-Alun Wonosari menuju TBG. Acara tersebut dilanjutkan dengan Aubade menyanyikan lagu-lagu nasional.

Gambar. III.14 Aubade Paskibraka Kab. Gunungkidul.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- m) Pemusatan latihan dilaksanakan di SKB Gunungkidul, dengan diawali pembukaan desa bahagia yang dilaksanakan oleh wakil Bupati Gunungkidul yang diikuti 72 siswa capaskibraka dari perwakilan sekolah se Kab. Gunungkidul. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.

Gambar. III.14 Pembukaan desa bahagia Paskibraka Kab. Gunungkidul.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Gambar. III.14 Latihan Paskibraka Kab. Gunungkidul.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang dilaksanakan di Pendopo Taman Budaya Gunungkidul (TBG) pada Kamis, 15 Agustus 2024 sore. Upacara Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, H. Sunaryanta. Turut hadir dalam acara tersebut Forkopimda, Kepala OPD serta orang tua/wali dari Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Bupati Gunungkidul, mengukuhkan sebanyak 72 Paskibraka Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya akan bertugas sebagai pengibar bendera pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 bertempat di Alun-Alun Wonosari pada tanggal 17 Agustus 2024 dan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025.

Gambar. III.15 Pengukuhan Paskibraka Kab. Gunungkidul



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

o) Pelaksanaan Upacara bendera 17 Agustus 2024 dan penurunan bendera.

Gambar. III.14 Pengibaran Bendera dan penuruna Bendera Upacara 17 Agustus oleh Paskibraka Kab. Gunungkidul.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

p) Ramah Tamah Paskibraka 2024 Kab. Gunungkidul Bersama Gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2024

Gambar. III.16 ramah Tamah paskibraka bersama gubernur DIY



Sumber : Bidang Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- q) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gunungkidul bersama Forkopimda. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua GOW Kabupaten Gunungkidul Hj. Diah Sunaryanta, Pembina GOW Hj. Badingah, S.Sos, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, SE, Kapolsek Nglipar AKP Sutarjo, dan anggota Organisasi Masyarakat Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan Kemitraan ini mengambil tema “Gunungkidul RA Kartini, Semangat Berkarya Membangun Gunungkidul yang Lebih Baik”.

Gambar. III.16 Kemitraan Pembinaan Ormas



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- r) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan “Pengembaraan Kebangsaan” yang didanai oleh Dana Keistimewaan, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November pada tanggal 8 November 2024 di Rest Area Tugu Soedirman Bedoyo, Ponjong. Bersama dengan KNPI Kabupaten Gunungkidul, acara tersebut diikuti oleh 80 orang peserta. Pengembaraan Kebangsaan bertujuan untuk menanamkan kembali semangat kebangsaan untuk generasi muda. Johan Eko Sudarto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpesan kegiatan pengembaraan kebangsaan ini dapat dijadikan bekal mereka untuk menghadapi tantangan masa kini sebagai antisipasi pergeseran nilai akibat perubahan teknologi seperti perubahan transformasi digital, kemiskinan, perjudian online dan peredaran minuman keras.



Gambar. III.17 Pengembaraan Kebangsaan



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- s) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul mengadakan Sekolah Penggerak Kerukunan yang diselenggarakan di Aula BMT Dana Insani. Acara tersebut diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari 40 orang perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gunungkidul dan 10 orang perwakilan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Gunungkidul. Hadir dalam acara tersebut Bupati Gunungkidul yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Eddy Praptono, M.Si.

Gambar. III.18 Pengembaraan Kebangsaan



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- t) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan konser kebangsaan yang didanai Dana Keistimewaan. Konser Kebangsaan Pentas Bhinneka Tunggal Ika yang berkolaborasi dengan Omah Seni Tanjung Anom (OSTA) Gunungkidul tersebut mengusung tema “Merajut Kebhinekaan Bersatu Dalam Keberagaman”. Selaras dengan tema tersebut yang berarti kita sebagai bangsa Indonesia tetap satu, saling menerima perbedaan dan menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sehari-hari



dimana dalam berkehidupan bermasyarakat terdapat berbagai agama, suku, budaya dan ras, kegiatan ini bertujuan untuk mengingat, menanamkan, menumbuhkan, memelihara dan merajut kembali kesatuan dan persatuan kita ditengah adanya gesekan akibat perbedaan pendapat serta meningkatkan rasa cinta tanah air di era globalisasi dan modernisasi yang menjadikan batasan suku, budaya, agama dan ras antar negara di dunia yang semakin tipis. “Maksud kegiatan ini untuk menanamkan dan menggelorakan semangat nasionalisme dengan tetap menjaga keberagaman, pluralitas dan multikulturalisme ditengah-tengah perubahan jaman. Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan gairah semangat kebangsaan untuk semakin mencintai Indonesia, mencintai Yogyakarta dan mencintai Gunungkidul.”

Gambar. III.19 Konser Kebangsaan Pentas Bhinneka Tunggal Ika



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
- b. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
- c. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
- d. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.



- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
- b. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun di kalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan instansi dan lembaga terkait.
- c. Memfokuskan pada memberdayakan FKUB, FKDM, PPWK, FPK, BNK dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/ masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa untuk lebih berperan dalam pencegahan konflik.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat.
- e. Menyasar pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dari berbagai macam kalangan masyarakat baik itu perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, anak-anak.
- f. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauannya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.



- b. Koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul dengan forum-forum kemitraan, seperti FKUB, FPK, dan FKDM.
- c. Adanya Perda maupun Pergub yang menguatkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel III.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,15	82,78*	103,28	Sangat Tinggi

*) Nilai LKjIP tahun 2023

Dari data diatas menggunakan data Tahun 2023 karena data Tahun 2024 belum di evaluasi, terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,15 terealisasi 82,78 sehingga capaian kinerja sebesar 103,28%. Dalam LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2023 telah melakukan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Dalam rangka tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan sebagai berikut :



Tabel III.14 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	SOP pengumpulan data kinerja perlu di Reviu	Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data kinerja
2.	Belum semua Pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan sosialisasi kepada semua Pegawai tentang pengukuran kinerja
3.	Belum semua Pegawai memahami dan peduli atas hasil atas hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal	Melakukan Sosialisasi kepada semua Pegawai tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

Sumber data: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	78,87	82,55	82,78*	83	99,73

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2024

**) Nilai LKJIP tahun 2023*

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya yaitu 82,55 (BB). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :



Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel III.17 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	103,28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul mempunyai komitmen selalu mengedepankan keterbukaan informasi dalam melakukan pelayanan badan publik. Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul memperoleh penghargaan yaitu oleh Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta sebagai Sebagai Mitra Kerja dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas kelas I TPI Yogyakarta.



Gambar. III.19 Penghargaan Kantor Imigrasi Kelas kelas I TPI Yogyakarta



Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul memperoleh penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yaitu Piagam Penghargaan atas Dukungan dan Kerjasamanya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 .

Gambar. III.20 Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan



5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Kualitas sumberdaya yang perlu ditingkatkan
- b. Kompetensi aparatur belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan
- c. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan
- d. Jaringan sinergitas Tupoksi antar bidang yang perlu diperkuat
- e. Akses terhadap data dan informasi perlu ditingkatkan

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP
- b. Maksimalkan pemanfaatan fasilitas pendukung kerja (sarana prasarana) serta anggaran yang ada dalam upaya menghadapi semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara normatif sesuai peraturan perundangundangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Jumlah sumber daya yang memadai
- b. Komitmen pimpinan yang kuat dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa
- c. Dukungan pengembangan Informasi dan Teknologi dan jaringan yang memadai

B. Capaian Kinerja Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 tidak mengampu kegiatan lain seperti SPM dan SDG's,



karena berdasarkan tupoksinya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja Pengarusutamaan Gender dalam Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang memperhatikan pemenuhan hak aksesatas kelompok afirmatif gender namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul diantaranya:

1. Apel Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika untuk anak-anak sekolah



2. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan peserta perwakilan perempuan, pemuda dan tokoh masyarakat.
3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gunungkidul bersama Forkopimda
4. Paskibraka dalam kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.8/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tertanggal 25 November 2024 mendapat alokasi dana sejumlah Rp34.822.839.501,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp34.394.508.903,00 atau 98,77%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp428.330.598,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Selisih	Efisiensi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	283.273.000	272.404.038	96,16	10.868.962	3,84
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	283.273.000	272.404.038	96,16	10.868.962	3,84
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.101.928.400	1.045.982.559	94,92	55.945.841	5,08
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.101.928.400	1.045.982.559	94,92	55.945.841	5,08

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Selisih	Efisiensi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.448.747.868	30.420.108.668	99,91	28.639.200	0,09
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.448.747.868	30.420.108.668	99,91	28.639.200	0,09
	1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	36.354.700	32.388.500	89,09	3.966.200	10,91
	2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.412.393.168	30.387.720.168	99,92	24.673.000	0,08
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.625.000	48.026.400	69,98	20.598.600	30,02
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.625.000	48.026.400	69,98	20.598.600	30,02
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	283.009.000	261.504.440	92,40	21.504.560	7,60

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Selisih	Efisiensi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	283.009.000	261.504.440	92,40	21.504.560	7,60
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	365.007.300	300.952.250	82,45	64.055.050	17,55
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	365.007.300	300.952.250	82,45	64.055.050	17,55
	1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.240.000	1.237.475	99,80	2.525	0,20
	2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.600.000	16.000.000	57,97	11.600.000	42,03
	3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	159.912.400	148.609.875	92,93	11.302.525	7,07

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No.	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian	Selisih	Efisiensi
			(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.954.900	15.954.900	100,00	0	0,00
	5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	160.300.000	119.150.000	74,33	41.150.000	25,67
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.272.248.933	2.045.530.548	90,02	226.718.385	9,98
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.413.900	81.486.750	97,69	1.927.150	2,31
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.380.901	1.557.000.979	98,65	21.379.922	1,35
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.831.900	8.554.568	78,98	2.277.332	21,02
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.424.800	201.478.717	63,27	116.946.083	36,73
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.592.032	95.952.255	53,43	83.639.777	46,57
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.605.400	101.057.279	99,46	548.121	0,54
Jumlah			34.822.839.501	34.394.508.903	98,77	428.330.598	1,23

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2024 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi
					(Rp)			
1.	Persentase konflik sosial yang tertangani	91	100	109,89	32.550.590.568	32.348.978.355	99,38	201.612.213
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,15	82,78	103,28	2.272.248.933	2.045.530.548	90,02	226.718.385
Jumlah Belanja Total					34.822.839.501	34.394.508.903	98,77	428.330.598
Jumlah Belanja Program Utama					32.550.590.568	32.348.978.355	99,38	201.612.213
Jumlah Belanja Program Penunjang					2.272.248.933	2.045.530.548	90,02	226.718.385

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2024

*) Nilai LKjIP tahun 2023

Berdasarkan tabel III.18 di atas capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 34.822.839.501,00 terealisasi Rp34.394.508.903,00 atau 98,77% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp428.330.598,00 atau 1,23% yang bersumber dari:

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Berkurang dari 10 Tenaga Non ASN menjadi 8 Orang, dikarenakan diterima menjadi PPPK Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Perjalanan Dinas Forkopimda pada Forkopimda tidak dapat mengikuti kegiatan, karena ada Ketugasan yang tidak bisa ditinggalkan.
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi berkurang karena Personil di terima menjadi PPPK tahun 2024 sejumlah 2 Orang.
- Rencana Penganggaran Untuk Pindah Kantor ada di Bulan Juli 2024 akan tetapi baru disetujui di Bulan Oktober 2024, Sehingga Anggaran Pembayaran Tagihan Listrik dan Air untuk Gedung lama dan Gedung Baru terealisasi di bulan November 2024



- Kegiatan Desk Pilkada karena sesuai dengan regulasi, Desk Pilkada dilaksanakan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- Belanja tidak direalisasikan Kegiatan FGD Forkopimda yang tidak dilaksanakan karena Pimpinan DPRD Tahun 2024-2029 belum dilantik secara definitive dan Bupati Melakukan cuti berkenaan dengan mencalonan diri sebagai Bupati pada Pilkada Tahun 2024.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul misalnya aplikasi Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul (<https://siapgaspol-kesbangpol.gunungkidulkab.go.id/>)
3. Proyek Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gunungkidul dengan “Strategi Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Membangun Kerukunan di Kabupaten Gunungkidul tujuan akhirnya adalah untuk menjaga dan merawat kohesi sosial di Kabupaten Gunungkidul yaitu membangun, menjaga, dan merawat kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul atau lebih dikenal dengan sekolah penggerak kerukunan dengan dasar hukum Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan sebagai berikut :



Sumber Data: Bidang Kesatuan Bangsa

Berikut Kegiatan pelaksanaan kegiatan Sekolah Penggerak Kerukunan pada tahun 2024:



Gambar. III.20 Sekolah Penggerak Kerukunan Kabupaten Gunungkidul



Sumber Data: Bidang Kesatuan Bangsa

- a) Sekolah Penggerak Kerukunan yang diselenggarakan di Aula BMT Dana Insani. Acara tersebut diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari 40 orang perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gunungkidul dan 10 orang perwakilan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Gunungkidul.
- b) Sekolah Penggerak Kerukunan yang diselenggarakan di Aula BMT Dana Insani. Peserta Sekolah Penggerak Kerukunan yakni perwakilan dari HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, serta IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) Kabupaten Gunungkidul.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SDM yang masih belum mumpuni baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
2. Masih tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gunungkidul
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
4. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
5. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
6. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
7. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.
8. Keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara internal dan stakeholder terkait. Penguatan forum-forum kemitraan juga di lakukan dengan maksimal sesuai dengan ketugasan masing-masing.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
2. Peningkatan kualitas dan sinergitas program ketahanan nasional dengan melibatkan para pemangku kepentingan
3. Peningkatan fasilitas pendukung berbasis elektronik (website)
4. Melaksanakan program kegiatan Sinau Pancasila dengan materi 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika
5. Melaksanakan Pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus Partai Politik serta pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Daerah.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan supaya ormas dapat mengetahui dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mempunyai peningkatan kapasitas.
7. Melaksanakan program kegiatan melalui sosialisasi bahaya penggunaan narkoba.
8. Melaksanakan program kegiatan melalui sosialisasi pencegahan terorisme.
9. Melaksanakan fasilitasi forum-forum kemitraan yang mendukung kondusivitas wilayah Gunungkidul (FKDM, FKUB, FPK).
10. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masyarakat.
11. Melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi daerah.



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Th 2024 beserta perubahannya*
- 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2023*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2023*

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Wongso Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu

Jalan Brigjen Katamsa 10 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon (0274) 391 537 Faksimile (0274) 391 537

Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH.
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Wonosari, 5 Januari 2024
Pihak Kesatu,

JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	91
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80.15

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	284.163.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.303.578.124,00	APBD
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	1.100.384.400,00	APBD
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	30.420.297.458,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	68.225.000,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp	283.009.000,00	APBD
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	364.807.300,00	APBD


Pihak Kedua
H. SUNARYANTA

Januari 2024
Pihak Kesatu

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JOHAN EKO SUDARTO S.Sos. MH

Pihak Kesatu,



AHMAD AHSAN JIHADAN, S.Psi., M.A

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,15

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2 303 578 124,00	APBD

Pihak Kedua



JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kesatu



AHMAD AKHSAN, JHADAN S Psi, M A



DIANA ESTI LESTARI, S.Sos. MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
		5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
		6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		7.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294
		8.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
		9.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 82.813.900,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.595.060.682,00	APBD

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu


AHMAD ARSAN JIHADAN, S.Psi., M.Ag


DIANA ESTI LESTARI, S.Sos, MAP



SULASTRI, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8
		2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		3 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		4 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
		5 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
		6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	350
		7 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24
		8 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
		10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		11 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46
		12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22
		13 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
		14 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20
		15 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	10.831.900,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	232.197.400,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	102.534.042,00	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	280.140.200,00	APBD
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	410.000,00	APBD

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua



AHMAD AHSAN JIHADAN, S.Psi., M.Ag

Pihak Kesatu



SULASTRI, S. Sos

JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID KESATUAN BANGSA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1 Presentase konflik sosial yang diselesaikan dalam wilayah	Persen	91

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.100.384.400,00	APBD
2 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 283.009.000,00	APBD
3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 364.807.300,00	APBD
4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 284.163.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua



JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH.

Pihak Kesatu



NANI ASYFIAH, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦼꦱꦧꦁꦏꦼꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦼꦱꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦼꦱꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamsa 10 Wonosari Gunungkidul, 55813

Telepon (0274) 391 537 Faksimile (0274) 391 537

Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Basirahayu SIP,MAP

Jabatan : Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Nani Asyiah S,Sos, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

NANI ASYFIAH, S.Sos, M.Si

Pihak Kesatu,

BASIRAHAYU, SIP,MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	135
		2	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150
		3	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4
		4	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 283.009.000,00	APBD

2 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp	1 240 000.00	APBD
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp	27 600 000.00	APBD
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	160 300 000.00	APBD

Pihak Kedua



NANI ASYFIAH, S.Sos, M.Si

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kesatu



BASIRAHAYU, SIP., MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA BINA IDEOLOGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	300
		2 Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	3

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.100.384.000,00	APBD
2.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp. 284.163.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua



NANI ASYFIAH, S.Sos, M.Si

Pihak Kesatu



LILIESTIANI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Brigjen Katamsa 10, Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon (0274) 391 537 Faksimile (0274) 391 537

Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Budi Sri Rahayu

Jabatan Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Nani Asyfia, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

NANI ASYFIAH, S.Sos, M.Si

Pihak Kesatu,

BUDI SRI RAHAYU

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA KEWASPADAAN DINI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	890
		2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	14

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 159.712.400,00	APBD
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 15.954.900,00	APBD

Pihak Kedua



NANI ASYFIAH, S.Sos, M.Si

Wonosari, 5 Januari 2024
Pihak Pertama



BUDI SRI RAHAYU

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1 Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	72

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 30.420.297.458,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 68.225.000,00	APBD

Pihak Kedua

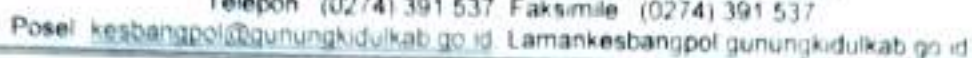


BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH.

Wonosari, 5 Januari 2024
Pihak Kesatu



SUMARTO, S.Pd, MM



WIDODO, SH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	350
		2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	20

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 30.420.297.458,00	APBD

Pihak Kedua


SUMARTO, S.Pd, MM

Wonosari, 5 Januari 2024
Pihak Kesatu


WIDODO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

amangkabangpol

Jalan Brigjen Katamsi 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon (0274) 391 537 Faksimile (0274) 391 537

Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Purwo Handoko, S.Sos, M.M

Jabatan : Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Sumarto, S.Pd, MM

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

SUMARTO, S.Pd, MM

Pihak Kesatu,

PURWO HANDOKO, S.Sos, M.M

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1. Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	Orang	290

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 68.225.000,00	APBD

Pihak Kedua


SUMARTO, S.Pd, MM

Wonosari, 5 Januari 2024

Pihak Kesatu


PURWO HANDOKO, S.Sos., M.M

RENCANA KERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul
2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	
Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	91
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,15

Wonosari, 5 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul



JOHANEKO SUDARTO, S.Sos, MH.
NIP. 19718912 199101 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦨꦏꦱꦠꦸꦤꦨꦁꦨꦏꦧꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHAN EKO SUDARTO

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 2 September 2024
Pihak Kesatu,

JOHAN EKO SUDARTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek Konflik Sosial yang tertangani tahun 2026	Persen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,15

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.	284.163.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.272.248.933,00	APBD
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.101.928.400,00	APBD
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	30.448.747.868,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	68.625.000,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp.	283.009.000,00	APBD

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 365.007.300,00	APBD





Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD AHSAN JIHADAN

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 September 2024



Pihak Kesatu,



AHMAD AHSAN JIHADAN

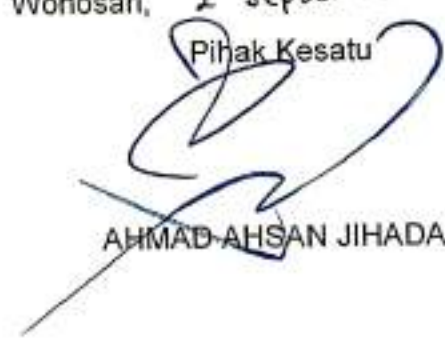
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,15

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.272.248.933,00	APBD



 Pihak Kedua
JOHAN ERO SUDARTO

Wonosari, 2 September 2024
 Pihak Kesatu

AHMAD AHSAN JIHADAN

DIANA ESTI LESTARI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
		5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
		6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		7.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294
		8.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
		9.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 83.413.900,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.578.380.901,00	APBD

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kedua



AHMAD AHSAN JIHADAN

Pihak Kesatu



DIANA ESTI LESTARI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8
		2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		3 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		4 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
		5 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
		6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	350
		7 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24
		8 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
		10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		11 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46
		12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22
		13 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
		14 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20
		15 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	10.831.900,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	233.424.800,00	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	85.000.000,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	179.592.032,00	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	101.605.400,00	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	410.000,00	APBD

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kedua

AHMAD AHSAN JIHADAN

Pihak Kesatu

SULASTRI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦩꦒꦏꦧꦏꦱꦧꦤ꧀ꦏꦱꦠꦸꦤꦧꦁꦱꦏꦧꦤ꧀ꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANI ASYFIAH

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kesatu,

NANI ASYFIAH

Pihak Kedua,

JOHAN EKO SUDARTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABID KESATUAN BANGSA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1 Presentase konflik sosial yang diselesaikan dalam wilayah	Persen	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.101.928.400,00	APBD
2 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 283.009.000,00	APBD
3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 365.007.300,00	APBD
4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 284.163.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kesatu


NANI ASYFIAH



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	135
		2 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150
		3 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4
		4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 283.009.000,00	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 1.240.000,00	APBD
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 27.600.000,00	APBD
-	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 160.300.000,00	APBD

Pihak Kedua



NANI ASYFIAH

Wonosari, 2 September 2024
Pihak Kesatu



BASIRAHAYU



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦩꦏꦁꦏꦱꦁꦧꦤ꧀ꦏꦱꦁꦧꦤ꧀ꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIESTIANI

Jabatan : Ketua Tim Kerja Bina Ideologi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kedua,

NANI ASYFIAH

Pihak Kesatu,

LILIESTIANI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA BINA IDEOLOGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	300
		2 Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	3

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.101.928.400,00	APBD
2.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp. 284.163.000,00	Dana Keistimewaan

Pihak Kedua



NANI ASYFIAH

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kesatu



LILIESTIANI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦑꦼꦱꦧꦁꦥꦺꦴꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦩꦤ꧀ꦏꦼꦱꦠꦸꦤ꧀ꦨꦁꦱꦏꦺꦴꦩꦤ꧀ꦥꦺꦴꦥꦺꦴꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI SRI RAHAYU

Jabatan : Ketua Tim Kerja Kerja Kewaspadaan Dini

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kedua,

NANI ASYFIAH

Pihak Kesatu,

BUDI SRI RAHAYU

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA KEWASPADAAN DINI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

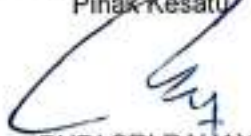
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	890
		2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	14

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 159.912.400,00	APBD
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 15.954.900,00	APBD

Pihak Kedua


NANI ASYIAH

Wonosari, 2 September 2024
 Pihak Kesatu


BUDI SRI RAHAYU

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1. Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	72

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 30.448.747.868,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 68.625.000,00	APBD



Wonosari, 2 September 2024
 Pihak Kesatu


 SUMARTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦏꦱꦠꦸꦤꦧꦤꦶꦏꦏꦺꦴꦧꦏꦸꦤꦏꦸꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDODO

Jabatan : Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMARTO

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


SUMARTO


WIDODO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	350
		2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	20

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 30.448.747.868,00	APBD

Pihak Kedua


SUMARTO

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kesatu


WIDODO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1. Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	Orang	290

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 68.625.000,00	APBD

Pihak Kedua


SUMARTO

Wonosari, 2 September 2024

Pihak Kesatu


PURWO HANDOKO

RENCANA KERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	
Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,15

Wonosari, 2 September 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul

JOHAN PLO SUDARTO
NIP. 197100121991011 001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2024

Nomor : 700.12.7 / EV-LKJIP / 018
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04/EV-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret 2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar

dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah

Predikat	Interpretasi
	terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Interpretasi
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Kondisi

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Tidak terdapat catatan hasil evaluasi

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu di reviu.
- 3) Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan

pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja.
- 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, memperoleh nilai sebesar 82,78 dengan kategori A (Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,15
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,89
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,89
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	82,78

Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

3. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, mohon menjadikan periksa.

INSPEKTUR



SARTOYO, S.Sos, M.Si ✓
Pembina Utama Muda, Gol/IVc
NIP 19710325199101001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

NO	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	---	
a.	Dokumen Perencanaan yang telah tersedia	---	NIHIL
b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART menggunakan penyalarsan (cascading) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	---	NIHIL
c.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	---	NIHIL
2	PENGUKURAN KINERJA	---	
a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan		NIHIL
b.	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	SOP pengumpulan data kinerja perlu di Reviu	Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data kinerja
c.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Belum semua Pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan sosialisasi kepada semua Pegawai tentang pengukuran kinerja

NO	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3	LAPORAN KINERJA	---	
a.	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	---	NIHIL
b.	Dokumen kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kuantitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan	---	NIHIL
c.	Pelaporan kinerja telah membawa dampak yang besar dalam penyusunan strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	---	NIHIL
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	---	
a.	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	---	NIHIL
b.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	---	NIHIL
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	Belum semua Pegawai memahami dan peduli atas hasil atas hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal	Melakukan Sosialisasi kepada semua Pegawai tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

Ph. ... Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten ...



...
 Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NRP. 198508291989031005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 391 537, Faksimile (0274) 391 537

Laman kesbangpol.gunungkidulkab.go.id, Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 20 Juni 2024

Nomor : 700.1.2.7/0975/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut AKIP BAKESBANGPOL
Kab. Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/018 tanggal 28 Maret 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, maka dengan ini kami kirimkan rencana tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih,

Pih. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 198808291989031005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

അദ്ധ്യക്ഷാപ്രസംഗം

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telefon : (0274) 391 537. Faksimile : (0274) 391 537

Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id | Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 37 / KPTS / 2024
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
24/KPTS/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah lampiran keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 30 Mei 2024



Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

- 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Merubah lampiran keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini;

KEDUA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 30 Mei 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 34 / KPTS/2024
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NO. SOP	JUDUL SOP AP
1	1	SOP Pengelolaan Surat Masuk
2	2	SOP Pengelolaan Surat Keluar
3	3	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
4	4	SOP Penyusunan I KJIP
5	5	SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
6	6	SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
7	7	SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA
8	8	SOP Pengajuan SPP dan SPM UP/UG
9	9	SOP Laporan-Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
10	10	SOP Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
11	11	SOP Laporan Keuangan Semesteran
12	12	SOP Laporan Keuangan Akhir Tahun
13	13	SOP Proses Usulan Kenaikan Pangkat
14	14	SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
15	15	SOP Pemberian Cuti Tahunan
16	16	SOP Surat Rekomendasi Cuti Besar
17	17	SOP Proses Permohonan Ijin Belajar
18	18	SOP Proses Hukuman Disiplin
19	19	SOP Proses Penyesuaian Ijazah
20	20	SOP Pengajuan Pemberhentian Pegawai
21	21	SOP Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan/LSM
22	22	SOP Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik
23	23	SOP Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
24	24	SOP Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
25	25	SOP Pelayanan Aduan Dugaan Pelanggaran
26	26	SOP Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Politik
27	27	SOP Pengumpulan Data Kinerja


 PEMERINTAH KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL
 HUYU NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 39 /KPTS/2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN
DATA KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Jalan Brigjen Katamso No. 10 Wonosari Kode Pos
55812 Telp. (0274) 391537, Fax. (0274) 391 537,
Laman kesbangpol.gunungkidulkab.go.id posel :
kesbangpol@gunungkidulkab.go.id,



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR SOP	: 51/KPTS/2024
TGL PEMBUATAN	: 30 Mei 2024
TGL REVISI	:
TGL PENETAPAN	: 30 Mei 2024
DITETAPKAN OLEH	 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL WAHYU NUGROHO
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami teknik pengolahan data kinerja
2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Blanko/formulir pengumpulan data
4. Komputer
5. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN:

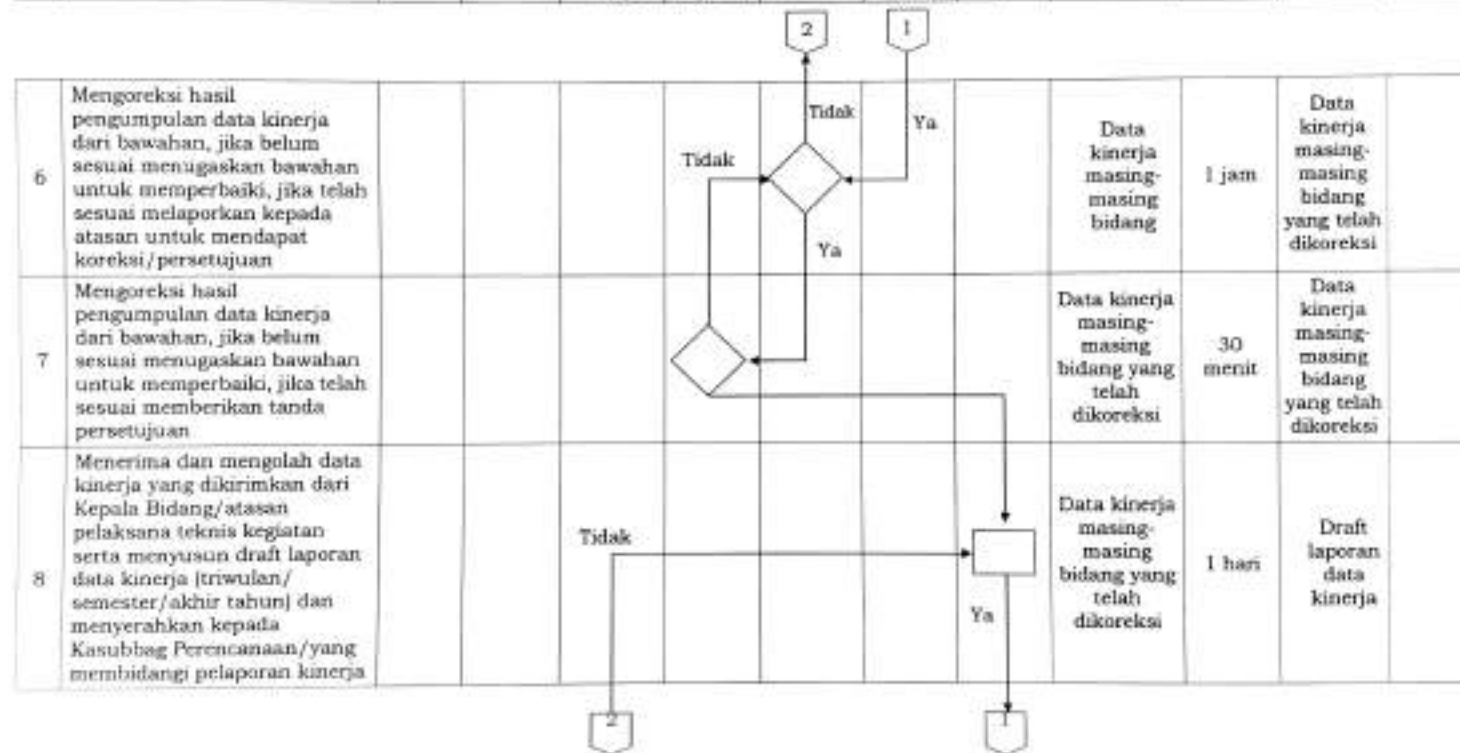
1. Ketidakakuratan data yang dilaporkan dan keterlambatan penyampaian laporannya dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

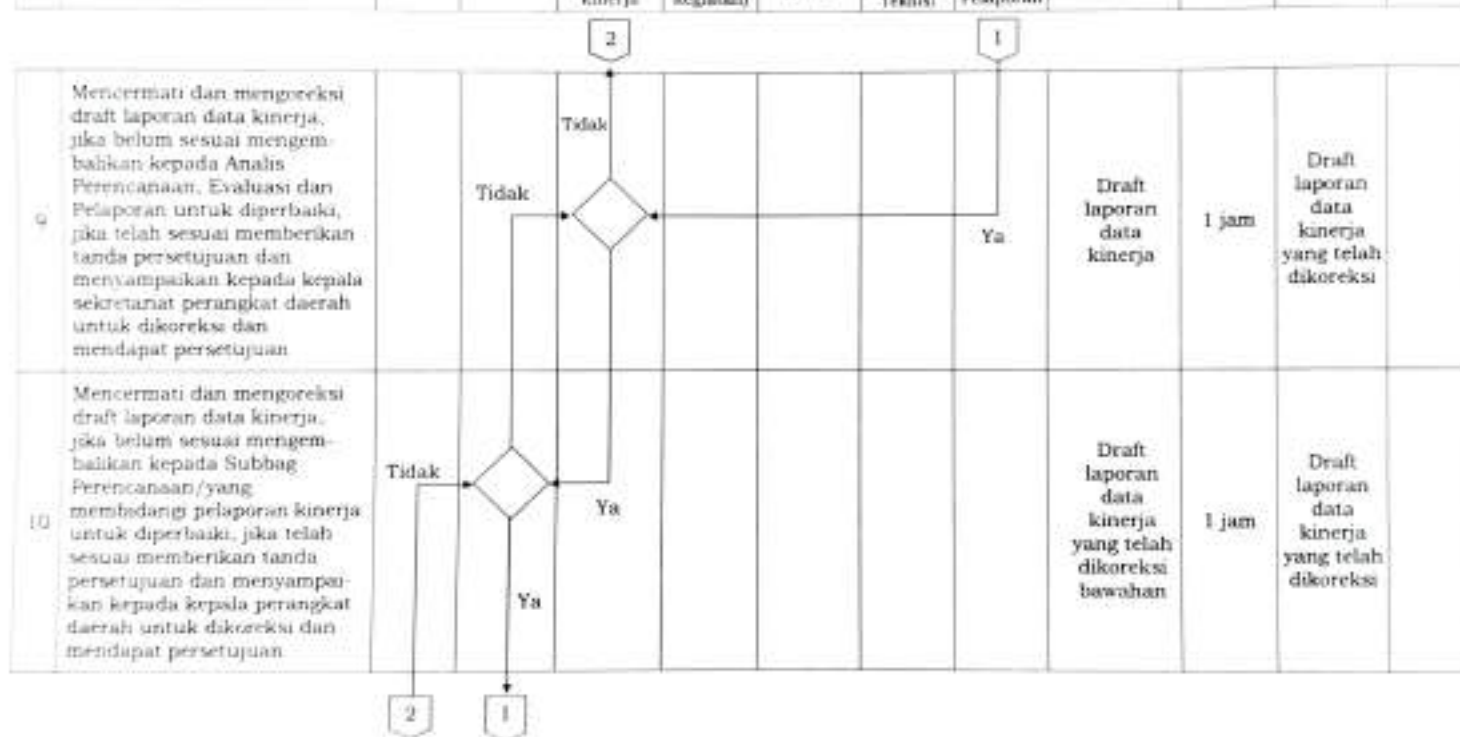
1. Memeriksa sumber data dan tanggal pemutakhiran data.
2. Menyusun konsep laporan data kinerja sesuai format yang telah ditentukan.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Kepala Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (sumber data)	Analisis/ Pengolah Data/ Pengadministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menugaskan sekretaris untuk mengumpulkan data kinerja perangkat daerah (triwulan/semester/ akhir tahun)								Disposisi/ surat permintaan data	5 menit	Disposisi	
2	Mengkoordinasikan Kepala Bidang untuk pengumpulan data kinerja (triwulan/ semester/akhir tahun)								Disposisi	1,5 jam	Kesepa- katan rapat	
3	Mengadakan rapat koordinasi pengumpulan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun) bersama semua pelaksana teknis kegiatan dan Kasubbag Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja								Disposisi	1 jam	Kesepa- katan hasil rapat	
4	Menugaskan bawahan (Analisis/ Pengolah Data/ Pengadministrasi) untuk mengumpulkan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun) di lingkup tugasnya								Kesepa- katan hasil rapat/ Disposisi	15 menit	Disposisi	
5	Mengumpulkan data kinerja (triwulan/ semester/akhir tahun) di lingkup tugasnya dan mengirimkan kepada atasan untuk diverifikasi					Tidak  Ya			Disposisi/ instrumen pengam- pulan data kinerja	1 minggu	Data kinerja masing- masing bidang	
												
												

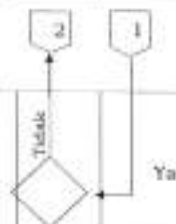
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (jumlah data)	Aspek/ Pengolah Data/ Pengadministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output



No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baik			
		Kepala Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat Daerah	Kamublag Perencanaan/ yang membimbing pelaporan kinerja	Kepala Bidang/ (tugas pelaksanaan teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (number data)	Analisis/ Pengolah Data/ Pengolah administrasi (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output



No.	Urutan Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku				
		Kepala Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan/ yang membimbing pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan / (sumber data)	Analisis/ Pengolah Data/ Pengelompokan (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
11	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada Kepala Sekretariat untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda tangan persetujuan								Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	30 menit	Laporan data kinerja yang telah ditanda tangani	
12	Menyimpan atau mengirimkan laporan data kinerja ke instansi yang berwenang								Laporan data kinerja	1 hari	Pengiriman laporan	SOP pengu-rusan surat keluar



PIHKEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL,





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦏꦼꦱꦠꦸꦤꦒꦺꦴꦨꦤꦏꦼꦱꦠꦸꦤꦒꦺꦴꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul 55813

Telepon (0274) 391 537 Faksimile (0274) 391 537

Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id Laman kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 3 Juni 2024

Nomor 000.8.3.2/0393/2024

Sifat Biasa

Lampiran 1 Lembar

Hal Undangan Rapat

Yth Semua Karyawan dan Karyawati
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di -

Wonosari

Dalam rangka menindak lanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Dengan ini kami mengharap kehadiran seluruh staff Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada:

hari : Selasa

tanggal : 4 Juni 2024

pukul : 09.00 WIB

tempat : Ruang Rapat Bakesbangpol Kabupaten Gunungkidul

acara : Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Tentang Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808291989031005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Brigjen Katamsa 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Email : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juni 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Acara : Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

NO	NAMA	JABATAN/PANGKAT	TANDA TANGAN	KET.
1	Wahyuni R	Plh. Kaban		
2	Ahsan Jihan	Alvinius R		
3	Nani Asyha	Kesbangpol		
4	Sulastri	Katubag dan		
5	Diana Estilastari	Katubag P & L		
6	Hendoko	Andas Kbyden		
7	Setyohani P	staf		
8	Rendi S.	Staf		
9	Triyutna	Pent. Perencanaan		
10	Liliechiani	Kesbangpol		
11	Iely Musyarofah	Kesbangpol		
12	Mansur	Kesbangpol		
13	Agus W	THL Kesbangpol		
14	Prasmaningrum	Kesbangpol		
15	Intan Wahyu S.	THL Kesbangpol		
16	Citra Cahyaningrum	Kesbangpol		
17	Dyah Prameswari	THL		
18	Diah Winarti	Kesbangpol		
19	Budi Su. Pelay	Bakeryayda		
20	Yeh Peta	Kesbangpol		
21	Eka S	Kesbangpol		
22	Widodo	—		
23	Diah Restu Wardani	THL Peldagri		
24	Widura	Katubag		
25	Habun Fely A	THL		

26	Aldi Kurniawan	TUL	huf	
27	Andika Purnawirato	TUL	huf	
28				
29				
30				

PI. Kepala Badan Kesatuan Bangsa



Drs. Wicaksono Nugroho, M.Si
 Berkecukupan Muda, IV/c
 NIP. 196806291989031005

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI TENTANG HASIL
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**

Pada Hari Selasa 4 Juni 2024, Jam 09.00 WIB, bertempat di RR Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diikuti oleh semua Pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol.

Kesimpulan rapat :

1. Paparan oleh pimpinan rapat tentang Hasil Penilaian AKIP PD Tahun 2023 yang telah di reviu oleh Inspektorat Daerah dengan Hasil penilaian 82,78 dengan katagori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja dengan nilai	26,15
b. Pengukuran Kinerja dengan nilai	23,89
c. Pelaporan Kinerja dengan nilai	12,89
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai	19,85
Jumlah	82,78
2. Mengharapkan semua pegawai turut berperan aktif terhadap implementasi hasil penilaian AKIP yang baik dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.
3. Memberikan Apresiasi dan terimakasih atas kekompakan dan Kerjasama dari semua TIM SAKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul atas terselesaikannya Dokumen LKjIP tahun 2023 dan nilai yang diraih dengan predikat A (Memuaskan).
4. Demikain laporan hasil rapat yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Notulen

Agus Wiyanto

DOKUMENTASI FOTO





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

အကယ်၍ မလေ့လာရုံသာမက ဆရာတော်၏ နာမည်ကို

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 5 Juli 2024

Nomor : 000.8.3.2/0524/2024

Sifat	Biasa
-------	-------

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Undangan Rapat

Yth. Semua Karyawan dan Karyawati
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di -

Wonosari

Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin

tanggal : 8 Juli 2024

pukeul : 09.00 WIB

tempat : Ruang Rapat Bakesbangpol Kabupaten Gunungkidul

acara : Rapat koordinasi penyusunan capaian kinerja
Triwulan II

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik.



Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808291989031005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Brigjen Katamsa 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 8 Juli 2024
Tempat : RR BAKESBANGPOL
Acara : Rapat koordinasi penyusunan capaian kinerja Triwulan II

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	Wahyuni N			8
2	Asep Jilham	St G.		
3	Sumarto			
4	Nani A	Kabid Kerbang		
5	Widada	Kesbangpol		
6	Diana Estilisti	Kasubag Pagle		
7	Budi Eri Rahayu	Dit/Kerbangpol		
8	Sulastri	Kasubag Umh		
9	Eka S.	Bid. Kesbang		
10	Lilieshiani	Bid Kesbang		
11	Wit Man			
12	Heni Nurharanah	Kerbang		
13	Gani Linauri	Kesbang		
14	Setyoni P	Sekretariat		
15	Budi Setyoni	Kesbangpol		
16	Ayui W.	"		
17	Indan Wahyu S.	Kesbangpol		
18	Anita L	Kesbangpol		
19	Yeti Patra	Kesbangpol		
20	Diah Restu W	Kesbangpol		
21	Melkior	"		
22	Hendro	"		
23				

24	Basimulya	kerbangpol	JP2	
25	Citra Cahyaningrum	kerbangpol	Citra	
26				
27				
28				
29				
30				

Mengetahui,
 Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik



[Signature]
 Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196808291989031005

LAPORAN HASIL RAPAT

Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja Triwulan II
Tempat : RR Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Hari/tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Jam : 09.00 WIB

Rapat koordinasi ini untuk penyusunan capaian kinerja Triwulan II pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul . Adapun hasil rapat tersebut adalah :

1. Pencermatan terhadap semua kegiatan yang belum terlaksana dan tidak bisa dilaksanakan untuk dikoordinasikan dengan subbag Perencanaan dan Keuangan karena realisasi kinerja dan anggaran menjadi dasar dalam pelaporan capaian serapan anggaran semester II Tahun 2024 dan juga karena adanya perubahan anggaran tahun 2024 diharapkan jika ada kegiatan yang akan dirubah atau di sesuaikan untuk segera dilakukan penyesuaian sesuai hasil desk dengan Bappeda dan TAPD.
2. Melaporkan pagu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 34.824.464.282,00 dengan capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar 44 ,87 % , capaian Keuangan sampai dengan semester II Tahun 2024 sebesar 89, 04 % atau Rp. 31.020.905.845,00.
Dengan rancangan realisasi Belanja Pegawai Rp. 637.775.827,00, Belanja Barang dan jasa realisasi Rp 661.325.864,00 Realisasi Belanja Hibah Rp. 29.701.804.109,00.
3. Diharapkan apa yang menjadi target semua kegiatan dapat terserap dan jika ada kendala dapat dikomunikasikan Bersama .

Notulen

Agus Wiyanto

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

alan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 391 537, Faksimile (0274) 391 537

Laman kesbangpol.gunungkidulkab.go.id, Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 8 Juli 2024

Nomor : 6/800.1-4-4/0529/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Karyawan Karyawati
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Mengharap kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara pada pertemuan yang akan kami
laksanakan pada :

hari/ tanggal : Selasa, 9 Juli 2024

waktu : Pukul 08.00 WIB

tempat : RR Badan Kesbangpol Kab. Gunungkidul

acara : Rapat Sosialisasi Pengisian e-kinerja Triwulan II Tahun 2024

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima
kasih.

Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808291989031005





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon (0274) 391 537, Faksimile (0274) 391 537
Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari Selasa
Tanggal 9 Juli 2024
Waktu 08.00 WIB
Tempat Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kab. Gunungkidul
Acara Rapat Sosialisasi pengisian e-Kinerja Triwulan II Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	NO. TELP/HP	TANDA TANGAN
1	Wahyuni, N			1
2	Alfian Jithron	Seb. Bar		2
3	Sumarto			3
4	Nani A	Kabid Kesbang	087835772527	4
5	Sulastri	Kabid. K. W. U.		5
6	Setyoheni Babars	Staf		6
7	Budi Setiyono	Staf		7
8	Intan Wahyu	THC		8
9	Berni Sri Pahan	Kl.		9
10	Warman	PK.		10
11	Anita Lestari	Staf		11
12	Gadis Winarni	Kesbang		12
13	Henri Nurhasanah	—	08471027037	13
14	Diana Estherbai	Kesbang P. K.	081328096829	14
15	Eka	Kesbang		15
16	Lilikchiani	Kesbangpol	081175454636	16
17	Agus. W.	—		17
18	Triguna	Kesbangpol	08999676151	18
19	Diah Retno W	—	085 24 417 117	19

20	Yeh Rbman	Donnasari		20
21	Widodo		21	
22	Hondoko		22	
23	Alansur	Kesbangpol	23	
24	Prasidya		24	
25	Duan P	Kesbang	25	
26	Citra Cahyeningrum	Kesbangpol	26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	



Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196508291989031005

Wonosari, Juli 2024

PPTH

Sulastri, S.Sos
Penata Tk.I, III/d
NIP. 197004021994032009

bulan April dan Mei sesuai dengan hasil RKPD, sedangkan untuk penilaian bulan Juni akan di ikutkan pada triwulan III;

e. Batas waktu pengisian dan penilaian pengelolaan kinerja triwulan II adalah 20 Juli 2024.

5. Pada rapat tersebut Sekretaris Badan Kesbangpol menghimbau kepada karyawan-karyawati untuk segera menyelesaikan tugas tersebut karena berpengaruh terhdap keberlangsungan masing-masing personal.
6. Selanjutnya diharapkan karyawan dan karyawati Badan Kesbangpol dapat melaksanakan himbauan Sekretaris Badan dengan maksimal mengingat waktu yang semakin dekat dengan batas akhir pengerjaan.

Notulis

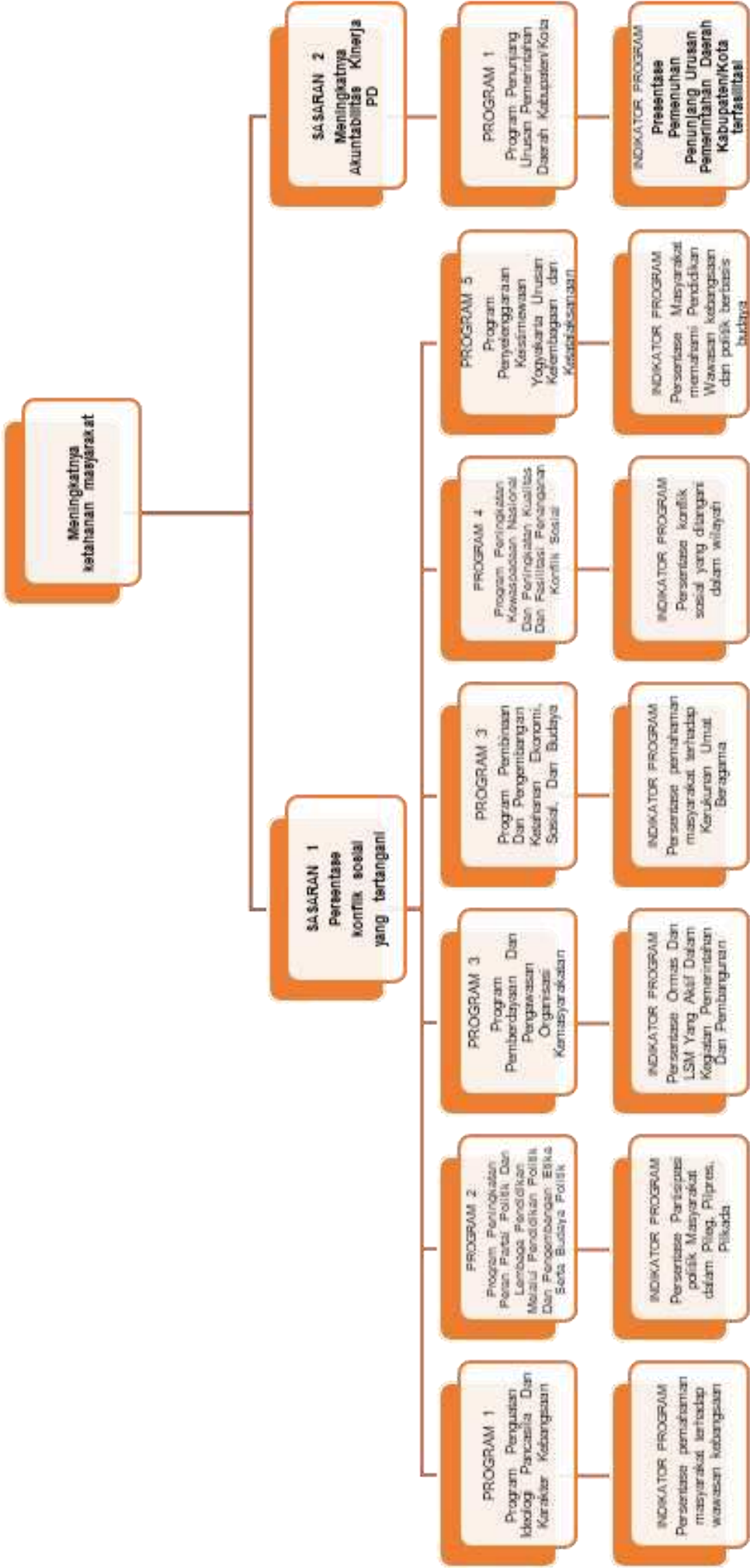


Budi Setiyono

DOKUMENTASI



Mandat Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



CASCADING SASARAN DAERAH, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

